



**Judul** : Pemindahan dikonsultasikan dengan DPR  
**Tanggal** : Kamis, 02 Mei 2019  
**Surat Kabar** : Kompas  
**Halaman** : 4

# Pemindahan Dikonsultasikan dengan DPR

Dalam tiga tahun ke depan, pemerintah akan mengkaji tiga daerah di Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi sebagai calon ibu kota negara pengganti Jakarta.

**TANGERANG, KOMPAS** — Tiga daerah di luar Pulau Jawa, yaitu Kalimantan, Sumatera, dan Sulawesi Selatan atau Sulawesi Barat, terus dikaji pemerintah untuk dijadikan calon ibu kota negara pengganti Jakarta. Namun, sebelum diputuskan, pemerintah akan mengundang para tokoh untuk diminta pendapat, selain juga akan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo setelah mengunjungi pabrik sepatu di Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (30/4/2019). "Ini ada tiga kandidat (daerah), tetapi memang belum diputuskan. Kita harus cek dahulu. Tiga tahun ini kita terus ke sana, bagaimana lingkungan dan daya dukungnya, airnya, kebencanaannya, banjir atau gempa bumi. Kemudian juga pengembangan untuk ibu kota ke depan apakah masih memungkinkan. Semua kalkulasi itu harus dirampungkan dan disampaikan lagi ke saya, baru saya putuskan," kata Presiden Jokowi.

Ditanya tiga daerah mana saja yang akan menjadi calon ibu kota, Presiden Jokowi menjawab, "Bisa di Sumatera, tetapi yang timur jauh. Di Sulawesi agak di tengah, tetapi ke arah barat kurang. Dan, Kalimantan di tengah-tengah. Ini ada tiga kandidat, tetapi memang belum diputuskan."

Menurut Presiden Jokowi, karena gagasan pemindahan ibu kota negara menyangkut

sebuah visi besar ke depan, semua aspek utama hingga teknis akan didalami. "Nanti semuanya, baik kajian hukum, sosial, maupun politik. Kalau sudah matang, nanti diputuskan. Tapi, ini tetap harus dikonsultasikan ke DPR," ujar Presiden.

Sebelumnya, dalam rapat terbatas yang dipimpinnya dan dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta menteri terkait pada Senin (29/4), prinsip perpindahan ibu kota ke lokasi yang tepat sudah disetujui. Namun, lokasi dan cara serta biaya pemindahan belum diputuskan (*Kompas*, Selasa, 30/4).

## Hindari kolusi

Dalam kesempatan terpisah, Kalla menyatakan, dalam kerangka ekonomi sekarang ini pemindahan ibu kota negara sesungguhnya mendorong kewenangan pusat untuk mengoordinasikan pembangunan di daerah-daerah menjadi lebih baik pada masa datang.

"Jakarta sendiri akan menjadi kota dagang seperti New York di Amerika Serikat. Adapun ibu kota negara yang baru Indonesia akan seperti Washington DC, ibu kota AS, yang fokus sebagai pusat pemerintahan," ujar Kalla.

Dengan adanya pemisahan pusat pemerintahan dan pusat bisnis, Kalla menilai hal itu menjadi lebih baik lagi. Sebab, akan bisa lebih dihindari kolusi antara pemerintah dan pihak dagang. Namun, peran-

an pemerintah di daerah akan lebih kuat.

Tentang pilihan perpindahan ibu kota mengarah ke luar Jawa, Kalla menambahkan, hal itu akan mendorong penyebaran kegiatan ekonomi, yang tidak hanya terpusat di Jawa. "Maka, diputuskan bahwa untuk memenuhi syarat itu, ya, di luar Jawa. Jadi, tujuannya dulu kita putuskan untuk lebih pemerataan ekonomi bangsa dan pemerintahan yang lebih fokus dan juga lebih nyaman," tutur Kalla.

Terkait Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah yang disebut-sebut sebagai lokasi yang akan dijadikan ibu kota negara, Wapres menilainya sebagai lokasi yang tepat. Sebab, kedua lokasi itu tidak hanya berada di tengah-tengah Indonesia, tetapi juga relatif aman dari bencana. "Asalkan, lokasinya bukan di pesisir selatan, atau di Sumatera yang termasuk dalam jalur cincin api," ujarnya.

Adapun Sulawesi mungkin saja memenuhi syarat. "Namun, tidak ada lahan kosong seluas 40.000-60.000 hektar yang siap digunakan untuk pembangunan kota dan pengembangannya di wilayah tersebut," ujarnya.

Lebih jauh Kalla menyatakan, setelah rapat terbatas, pemerintah akan melakukan studi lanjutan sekaligus menghasilkan rekomendasi lokasi bakal ibu kota negara yang memenuhi syarat.

(LAS/INA)